Jurnal Perempuan
untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 22 No. 4, November 2017
p-ISSN 1410-153X
e-ISSN 2541-2191
95

Perempuan Nelayan

Catatan Jurnal Perempuan
Perempuan Nelayan

Artikel

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan
Naufaludin Ismail

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina
Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan
Endah Kusuma Wardhani

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara
Yekti Wahyuni

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung
Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara
Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif
Abby Gina

Kata Makna
Nur Iman Subono

Profil
Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku
Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak
Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

YAYASAN YJP JURNAL PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Jurnal Perempuan
untuk pencerahan dan kesetaraan

Vol. 22 No. 4, November 2017

ISSN 1410-153X

PENDIRI
Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA
Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI
Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI
Atnike Nova Sigiro, M.Sc. (Human Rights Diplomacy, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI
Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA
Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI
Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN
Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK
Elisabet Dwi

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2017

FORDFOUNDATION

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan 95

Perempuan Nelayan
Fisherwomen

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Nelayan / *Fisherwomen* iii

Artikel / *Articles*

- Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias / *The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation* 295-309
  Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
- Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan / *Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance* 311-321
  Naufaludin Ismail
- Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina / *Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines* 323-331
  Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling
- Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan / *Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan* 333-344
  Endah Kusuma Wardhani
- Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara / *Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta* 345-357
  Yekti Wahyuni
- Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung / *Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung* 359-368
  Gadis Arivia & Abby Gina

Wawancara / *Interview*

Dedi Adhuri: Marginalisasi Perempuan Nelayan adalah Produk Kultur dan Kebijakan yang Diskriminatif / *Dedi Adhuri: Marginalization of Fisherwomen is Cultural Product and Discriminatory Policy* 369-374
Abby Gina

Kata Makna / *Words and Meaning*

Nur Iman Subono 375-376

Profil / *Profile*

Masnuah, Pejuang Hak-Hak Perempuan Nelayan / *Masnuah, Fisherwomen Rights Defender* *377-383*
Andy Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / *Book Review*

Ketika Pembangunan Mengabaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak / *When Development Disregards Women's and Children's Rights* 385-388
Naufaludin Ismail

Perempuan Nelayan
Fisherwomen

"Poros Maritim" dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah atau menjualnya di pasar-pasar. Mereka kadang tidak menerima upah di dalam bisnis rumah tangga. Bila pun mereka menangkap ikan di laut mereka dianggap hanya menemani suami. Definisi nelayan inilah yang membuat perempuan tidak diperhitungkan di sektor perikanan. Kontribusi perempuan nelayan dianggap tidak ada dan ini berdampak buruk terhadap perempuan nelayan karena tidak bisa mendapatkan akses kredit, teknologi pengolahan, fasilitas gudang pendinginan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kabar Bahari edisi 18 November-Desember 2015).

Panduan Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*) dalam konteks keamanan pangan dan penghapusan kemiskinan menyebutkan secara tegas kewajiban negara untuk memperlakukan perempuan nelayan termasuk pembudidaya dan petambak garam secara istimewa dan hak-haknya dijamin. Jaminan tersebut antara lain mendapatkan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis, tabungan investasi dan kredit, bebas dari pelecehan seksual dan kekerasan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, dengan merujuk kepada CEDAW. Bila perempuan nelayan tidak dijamin hak-haknya dan tidak didukung keberadaannya maka dapat diperkirakan bahwa kelompok miskin terbesar tentu datang dari golongan ini. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perempuan nelayan dan mengubah definisi nelayan yang sangat maskulin. Bila hal ini tidak dilakukan maka pencapaian SDGs dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan gagal terutama komponen esensial seperti pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesinambungan pembangunan dari perikanan dan sumber daya laut.

Oleh sebab itu, analisis gender dalam soal perikanan dan sumber daya laut menjadi penting agar produktivitas dan keadilan terhadap perempuan terjamin. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, membentuk "*champions*" (yang dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan), kerja sama dengan peneliti dan para ahli kebijakan. Koalisi besar ini dibutuhkan antara LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa lensa gender dibutuhkan dalam memformulasi kebijakan perikanan yang menitikberatkan pada hak-hak perempuan. Selama ini perspektif gender dalam isu perikanan sangat lemah karena hanya fokus pada produksi ikan yang dikuasai oleh laki-laki. Selain itu, peranan perempuan nelayan harus masuk ke dalam semua instrumen internasional maupun nasional (Alami & Raharjo 2017).

Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Langkah kami mendokumentasikan pengalaman dan suara perempuan nelayan dapat terwujud berkat kerja sama dengan Kiara, PPNI, P3UW dan Puspita Bahari. Hasil riset selain kami dokumentasikan dalam JP edisi ini juga kami narasikan dalam bentuk film dokumenter. Edisi ini diharapkan dapat mendorong adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan dengan membuka akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. Begitu juga dengan keberadaan film dokumenter, diharapkan dapat bermanfaat bagi proses advokasi perempuan nelayan di Indonesia. (**Anita Dhewy**)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 295-309, 3 tabel, 10 daftar pustaka

This research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen—who go to sea as well as who process the catches—and the activism of Puspita Bahari (fisherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve fisherwomen condition.

Keywords: exisistence of fisherwomen, fisherwomen, morodemak, purworejo, tambak polo, domestic violence.

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak dan Desa Purworejo dengan memfokuskan pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan—yang melaut maupun yang mengolah hasil tangkapan—dan aktivisme Puspita Bahari. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi penelitian yang personal karena penulis berkesempatan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perempuan nelayan yang melaut dan juga karena dalam perjalanannya peneliti ikut dalam perjuangan perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Dengan menggunakan analisis gender Naila Kabeer penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan berlapis-lapis mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas dan pasar. Persoalan pembagian kerja, birokrasi yang bias serta kekerasan dalam rumah tangga adalah tiga topik utama yang dikaji dalam tulisan ini. Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan menjadi urgensi dan langkah awal yang harus diwujudkan guna memperbaiki kondisi perempuan nelayan.

Kata kunci: eksistensi perempuan nelayan, perempuan melaut, morodemak, purworejo, tambak polo, KDRT perempuan nelayan.

Naufaludin Ismail (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perjuangan Rekognisi Identitas Hukum Perempuan Nelayan Ujung Pangkah, Gresik: Analisis Feminis terhadap Kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan

Struggle of Legal Identity Recognition of Fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik: Feminist Analysis toward Regulation on Fishermen Card and Insurance

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 311-321, 2 tabel, 10 daftar pustaka

This paper will focus on feminist analysis of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers and Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 16 of 2016 as the legal basis for policy on Fishermen Card and Insurance. This paper will also analyze the experiences of two fisherwomen in Ujung Pangkah, Gresik, East Java who successfully obtained legal identity in the form of fisher card and insurance as a form of legitimacy and recognition of their identity as fisherwomen. The strong patriarchal culture in various society layers, caused the recognition of the political identity of fisherwomen has become difficult, so a feminist analysis toward policy on fisher card and insurance is needed so that women can engage as active subjects in the policy.

Keywords: fisherwomen, patriarchy, sexism, legal identity, feminist policy

Tulisan ini akan berfokus pada analisis feminis pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk kebijakan Kartu dan Asuransi Nelayan. Tulisan ini juga akan menganalisis pengalaman dua perempuan nelayan di Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang berhasil mendapatkan akses identitas hukum berupa kartu dan asuransi nelayan sebagai bentuk legitimasi dan rekognisi identitas politik mereka sebagai perempuan nelayan. Kuatnya budaya patriarki di berbagai lapisan sosial-masyarakat menyebabkan pengakuan atas identitas hukum perempuan nelayan menjadi sulit untuk direkognisi, sehingga diperlukan sebuah analisis feminis atas kebijakan kartu dan asuransi nelayan agar perempuan bisa terlibat sebagai subjek aktif di dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci: perempuan nelayan, patriarki, seksisme, identitas hukum, kebijakan feminis

Ma. Linnea Villarosa-Tanchuling (College of Social Work and Community Development University of the Philippines – Diliman, Metro Manila, Filipina)

Perempuan dalam Sektor Perikanan Berbasis Gender: Peran, Isu dan Tantangan di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina

Women in Gendered Fisheries: Roles, Issues and Challenges in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 323-331, 1 tabel, 7 daftar pustaka

This paper is a synthesis of the results of the case studies on women's situation in fisheries done by the members of the SEA Fish for Justice Network. The network is composed of 15 non-government and fishers organizations from the Southeast Asia region. It envisions equity in access to and control over off-shore, coastal and inland aquatic natural resources including the termination of suffering caused by unsustainable resources and/or privatized control over communal resources. The case

studies were conducted by SEAFish Network members in Cambodia, Indonesia, Vietnam and Philippines in the second and third quarter of 2008 to highlight the roles, issues and challenges faced by women in coastal communities as well as the spaces provided them to facilitate their empowerment. The network members who conducted the studies were FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) and PROCESS-Bohol, CERD, and Tambuyog Development Center (CERD).

Keywords: women roles, women's participation, division of labor

Artikel ini merupakan sintesis dari hasil studi kasus pada perempuan dalam industri perikanan yang dilakukan oleh anggota SEA FISH for Justice Network. Jaringan ini terdiri dari 15 organisasi nonpemerintah dan nelayan dari kawasan Asia Tenggara. Jaringan ini mengupayakan keadilan dalam akses dan kontrol atas sumber daya alam lepas pantai, pesisir dan darat, termasuk penghentian krisis yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak berkelanjutan dan/atau privatisasi atas kontrol sumber daya yang bersifat publik. Penelitian dilakukan oleh anggota SEAFish Network di Kamboja, Indonesia, Vietnam dan Filipina pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2008 untuk menyoroti peran, isu dan tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat pesisir, serta ketersediaan ruang untuk mempermudah usaha pemberdayaan perempuan. Anggota jaringan yang melakukan penelitian adalah FACT (Cambodia), KIARA (Indonesia), MCD (Vietnam) dan PROCESS-Bohol, CERD, dan Tambuyog Development Center (CERD).

Kata kunci: peran perempuan, partisipasi perempuan, pembagian kerja

---

Endah Kusuma Wardhani (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Indonesia)

Reklamasi Teluk Jakarta, Pemiskinan dan Marginalisasi Perempuan Nelayan: Studi Kasus di Kampung Akuarium dan Kamal Muara, Penjaringan

Reclamation of Jakarta Bay, Impoverishment and Marginalization of Fisherwomen: Case Study at Akuarium and Kamal Muara Village, Penjaringan

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 333-344, 13 daftar pustaka

It has been more than ten years since The Jakarta Bay reclamation project displaced fishermen from the sea where they were normally fishing. The direct impact of reclamation on fisherwomen was income decrease, because it has damaged the marine ecosystems due to the effects of sucking and backfilling of the sea sand. In addition, there will be at least 16,998 of fishermen households will be evicted from the coastal areas of Jakarta, Banten and Bekasi due to this reclamation. The findings of this study are: the reclamation made the fisherwomen become poorer, their burden is higher and they have experienced double marginalization. The research methodology is a qualitative study with feminist perspective. Data collection are by in-depth interview with ten fisherwomen, document study, and fields observation. Selection of research sites is purposive, namely Kampung Akuarium dan Kampung Kamal Muara, District of Penjaringan, North Jakarta Municipality. In particular, this study wants to bring up the voices of poor fisherwomen as marginalized group of people, who have not been heard. It is hoped they will be brave and voiced their rights and aspirations openly which they have not dared to do so.

Keywords: fisherwomen, Jakarta Bay reclamation, marginalization, fisherwomen impoverishment

Proyek reklamasi Teluk Jakarta setidaknya telah lebih dari sepuluh tahun menggusur para nelayan dari wilayah perairan yang merupakan sumber penghidupan mereka. Dampak reklamasi secara langsung pada perempuan nelayan adalah penurunan pendapatan karena ekosistem laut sedemikian rupa hancur akibat penghisapan dan pengurukan pasir laut. Selain itu, setidaknya terdapat 16.998 rumah tangga nelayan akan tergusur dari wilayah pesisir Jakarta, Banten dan Bekasi akibat proyek reklamasi ini. Temuan dari penelitian ini adalah tenjadinya penurunan pendapatan, beban kerja perempuan nelayan yang makin besar, dan makin termarginalisasinya para perempuan nelayan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif berperspektif feminis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada sepuluh perempuan nelayan, studi dokumen, dan observasi di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian bersifat purposif, yaitu di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Secara khusus, penelitian ini ingin memunculkan suara-suara perempuan nelayan miskin sebagai kaum marginal perkotaan, yang selama ini tidak terdengar. Diharapkan mereka kemudian berani bersikap dan menyuarakan hak dan aspirasi secara terbuka yang selama ini belum berani mereka lakukan.

Kata kunci: perempuan nelayan, reklamasi Teluk Jakarta, marginalisasi perempuan nelayan, pemiskinan perempuan nelayan

---

Yekti Wahyuni (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia)

Peran Produksi, Reproduksi dan Sosial Kemasyarakatan Perempuan Pengolah Kerang Hijau di Muara Angke, Jakarta Utara

Productive, Reproductive and Community Roles of Women Who Process Green Shells in Muara Angke, North Jakarta

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 345-357, 2 gambar, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This study aims to find out the productive, reproductive and community roles of fisherwomen in Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta. The subjects of the study were two fisherwomen who work in the processing of green shells, as owners and as shell-peeler laborer. The study explores women's experience as breadwinners in the marine sector including the experience as a catch fisherwomen. The results showed that the role of fisherwomen in the productive and improvement of the family economy is very real, either directly or indirectly as a fisherwomen or processor of marine products. Three roles of fisherwomen in Muara Angke, sub-district Penjaringan, North Jakarta namely productive, reproductive, and social community. The fisherwomen took part in supplementing family income. In addition to performing reproductive roles related to domestic work, fisherwomen also have an active social role in social movements in order to maintain their living spaces and their spheres. The study found the tendency of women to abandon the role of capture fisherwomen when carrying out the role of biological reproduction.

Keywords: fisherwomen, economic roles, social roles, production roles, reproductive roles, social community roles

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran produksi, reproduksi dan sosial kemasyarakatan perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Subjek penelitian adalah dua orang perempuan nelayan yang bekerja di bidang pengolahan kerang hijau, sebagai pemilik dan sebagai buruh pengupas kerang. Penelitian menggali pengalaman perempuan sebagai pencari nafkah di sektor kelautan termasuk pengalaman sebagai nelayan tangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan nelayan dalam produksi dan peningkatan ekonomi keluarga sangatlah nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai nelayan maupun pengolah hasil laut. Tiga peran perempuan nelayan di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yakni produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Perempuan nelayan ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Selain menjalankan peran reproduksi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, perempuan nelayan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan dengan aktif dalam gerakan sosial dalam upaya mempertahankan ruang hidup dan ruang kelolanya. Penelitian menemukan kecenderungan perempuan meninggalkan

peran sebagai nelayan tangkap ketika menjalankan peran reproduksi biologis.

Kata kunci: perempuan nelayan, peran ekonomi, peran sosial, peran produksi, peran reproduksi, peran sosial kemasyarakatan

---

Gadis Arivia & Abby Gina (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kapabilitas Manusia untuk Pembangunan yang Berkeadilan: Studi Kasus Perempuan Petambak Udang di Dipasena, Lampung

Human Capabilities for Fair Development: Case Study of Women Prawn Farmers in Dipasena, Lampung

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 4, November 2017, hal. 359-368, 4 tabel, 5 daftar pustaka

This study examines the role of women prawn farmers in Dipasena, East Rawajitu District, Tulang Bawang, Lampung and what it means for human development in Indonesia. Several focus group discussions and indepth interviews with women prawn farmers and fishermen community were conducted to collect data and understand comprehensively the issues that women prawn farmers face in a patriarchal culture where they are not acknowledged as women workers. This paper uses a feminist perspective on women and work and Martha Nussbaum's capability categories. This paper concludes that women's roles and contribution in fishery and in national development is not recognized and not accommodated in national and local policies. Women's role in fishery industry is considered non-existent in this society and therefore restrict their potential and meaningful existence and respect on equal human dignity.

Keywords: women prawn farmers, capabilities, human dignity, development, Martha Nussbaum

Penelitian ini melihat peran perempuan petambak udang di Dipasena, Kabupaten Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung dan melihat apa dampaknya pada pembangunan manusia di Indonesia. Beberapa diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan para petambak perempuan dan komunitas nelayan dilakukan untuk pengumpulan data guna memahami secara komprehensif persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan petambak di dalam masyarakat patriarki, di mana mereka tidak diakui sebagai petambak perempuan. Tulisan ini menggunakan perspektif feminis tentang perempuan dan kerja dan pendekatan kapabilitas dari Martha Nussbaum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa peran dan kontribusi perempuan dalam perikanan dan pembangunan nasional tidak diakui dan tidak diakomodasi dalam kebijakan nasional dan daerah. Peran perempuan dalam industri perikanan tidak diakui dalam masyarakat sehingga membatasi eksistensi mereka yang potensial dan bermakna serta membatasi penghargaan atas kesetaraan manusia.

Kata Kunci: perempuan petambak udang, kapabilitas, kemartabatan manusia, pembangunan, Martha Nussbaum

Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan
Vol. 22 No. 4, November 2017, 295-309
DDC: 305

Eksistensi dan Kekuatan Perempuan Nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo: Melawan Kekerasan, Birokrasi & Tafsir Agama yang Bias

The Existence and Power of Fisherwomen in Morodemak and Purworejo Villages: Against Violence, Bureaucracy & Biased of Religious Interpretation

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina

Jurnal Perempuan
Jalan Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia

pratiwiandi@jurnalperempuan.com & abbygina@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 26 September 2017, direvisi 2 Oktober 2017, diputuskan diterima 17 Oktober 2017

Abstract

This research was conducted in Morodemak and Purworejo Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia, by focusing on the problem faced by fisherwomen—who go to sea as well as who process the catches—and the activism of Puspita Bahari (fisherwomen organization in Demak). This research seeks to show that women have contributed to the economic progress of coastal communities. This research became a personal research because the researchers have the opportunity to observe the activity of fisherwomen who go to sea and also in the research process, the researchers participated in the advocacy process to get recognition as fisherwomen. By using Naila Kabeer gender analysis, this research found that the complexity of the problems faced by fisherwomen are layers ranging from family, community, market until state levels. The issues of the division of labor, the biased bureaucracy and domestic violence are the three main topics that studied in this paper. Recognition of the identity of fisherwomen becomes an urgency and first step that should be realized in order to improve fisherwomen condition.

Keywords: exisistence of fisherwomen, fisherwomen, morodemak, purworejo, tambak polo, domestic violence.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak dan Desa Purworejo dengan memfokuskan pada persoalan yang dihadapi oleh perempuan nelayan—yang melaut maupun yang mengolah hasil tangkapan—dan aktivisme Puspita Bahari. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menjadi penelitian yang personal karena penulis berkesempatan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perempuan nelayan yang melaut dan juga karena dalam perjalanannya peneliti ikut dalam perjuangan perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Dengan menggunakan analisis gender Naila Kabeer penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan berlapis-lapis mulai dari level keluarga, masyarakat, komunitas dan pasar. Persoalan pembagian kerja, birokrasi yang bias serta kekerasan dalam rumah tangga adalah tiga topik utama yang dikaji dalam tulisan ini. Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan menjadi urgensi dan langkah awal yang harus diwujudkan guna memperbaiki kondisi perempuan nelayan.

Kata kunci: eksistensi perempuan nelayan, perempuan melaut, morodemak, purworejo, tambak polo, KDRT perempuan nelayan.

Pendahuluan

Sejak tahun 2014, Susi Pudjiastuti menjadi sosok sentral dalam kebijakan kelautan Indonesia—ia adalah perempuan pertama yang diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan—tak hanya itu ia juga menjadi potret kepemimpinan perempuan di pesisir dan laut Indonesia. Susi bukanlah satu-satunya, hampir di seluruh masyarakat pesisir di Indonesia perempuan selalu ada dan hadir dalam kerja-kerja domestik maupun publik rantai produksi perikanan, mulai dari proses penangkapan, pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran hingga penjualan. Namun sayangnya, kontribusi perempuan dalam rantai produksi perikanan tersebut kerap kali tidak diakui, karena budaya dan pandangan agama yang patriarkis, yang menganggap bahwa nelayan adalah laki-laki, melaut adalah aktivitas yang hanya dilakukan laki-laki, "*wong wedok kok miyang*!"[1].

Bias terhadap pekerjaan nelayan mengakar mulai dari level individu, desa, provinsi hingga nasional. Dampaknya payung hukum yang lahir pun bias gender. UU No. 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kebijakan publik tersebut lahir karena masih ada stereotip gender bahwa nelayan adalah laki-laki, sehingga definisi nelayan di atas tidak dapat mengakomodasi perempuan nelayan yang sesungguhnya memiliki

peran besar dalam perekonomian masyarakat pesisir. Perempuan masih tidak dianggap sebagai agen perekonomian keluarga. Mengapa demikian? Sejak awal identitas perempuan nelayan telah dihilangkan, bahkan dalam UU No.7 Tahun 2016 hanya pada pasal 45 yang secara eksplisit menyebutkan kata perempuan, itu pun tentang peran perempuan dalam rumah tangga nelayan. "Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ... memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam" (Pasal 45 UU No. 7 Tahun 2016). Definisi tersebut seakan-akan meniadakan peran publik perempuan nelayan di dalam masyarakat pesisir.

Hilangnya perempuan dalam UU No. 7 Tahun 2016 berarti menjauhkan perempuan dari akses terhadap program pembangunan arus utama. Paradigma pembangunan seperti ini dikritisi oleh Naila Kabeer, ia mengungkapkan bahwa ada persoalan serius yaitu tidak dilibatkannya perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan persoalan kebijakan yang hanya berfokus pada peran perempuan dalam keluarga yaitu sebagai ibu rumah tangga. Dengan kata lain, model pembangunan seperti ini hanya menyasar pada masyarakat laki-laki, sebagai kepala keluarga dan agen produktif, sementara perempuan mendapatkan program kesejahteraan yang secara eksklusif untuk peran gendernya dalam rumah tangga (Kabeer 1994, h. 5).

Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, eksistensi perempuan nelayan tidak bisa dipungkiri, baik perempuan nelayan di sektor produksi hasil tangkapan maupun perempuan nelayan yang menangkap ikan di laut. Potret kepemimpinan perempuan di masyarakat pesisir juga dapat ditemukan dalam Puspita Bahari, organisasi perempuan nelayan di Kabupaten Demak. Kehadiran Puspita Bahari menjadi penanda bahwa perempuan nelayan mampu menjadi tonggak dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Meski demikian, perempuan nelayan di Kabupaten Demak mengalami berbagai tantangan struktural seperti sistem birokrasi desa hingga provinsi dan tantangan kultural yaitu tafsir agama. Persoalan yang dihadapi perempuan nelayan tersebut membuat keberadaan perempuan nelayan tidak terlihat secara administratif, dampaknya akses dan kontrol terhadap program pembangunan yang ditujukan untuk nelayan tidak dapat dijangkau oleh perempuan nelayan. Meskipun masyarakat setempat mengetahui keberadaan perempuan nelayan, namun sebagian masyarakat enggan mengakuinya, alasannya antara lain: bukan pencari nafkah utama dan ada bias pada tafsir agama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Morodemak yang berada di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Morodemak adalah salah satu dari tiga desa nelayan yang terletak di Kecamatan Bonang, desa lainnya adalah Desa Purworejo dan Margolinduk. Penelitian mencoba memperlihatkan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan, tantangan dan kekuatan perempuan nelayan dalam memperjuangkan hak-haknya, melawan kekerasan dan stigma. Penelitian ini juga secara khusus menyoroti aktivisme Puspita Bahari sebagai organisasi perempuan nelayan di Kabupaten Demak. Aktivisme Puspita Bahari menarik untuk dikaji lebih jauh karena banyak dimensi gender yang dapat diteliti. Mulai dari relasi gender di dalam keluarga yang timpang, stigma dari masyarakat, hingga bagaimana perempuan nelayan anggota Puspita Bahari mampu membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin di pesisir dan laut Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis gender Naila Kabeer yang menitikberatkan pada analisis relasi sosial antara keluarga, masyarakat, komunitas, pasar dan negara. Lima dimensi relasi sosial analisis Kabeer; 1) Aturan: tertulis dan tidak tertulis; 2) Aktivitas: siapa yang melakukan apa, siapa mendapatkan apa, siapa berhak mengklaim apa (produksi, reproduksi, distributif); 3) Sumber daya: SDM, yang tidak terlihat, pendidikan, pangan, kapital; 4) Orang: Siapa yang terlibat dan siapa melakukan apa?, siapa diposisikan bagaimana?; 5) Kekuatan: siapa yang mengontrol, memutuskan, siapa dilayani. Dalam kerangka pikir analisis gender Naila Kabeer, relasi sosial di masyarakat berlapis-lapis dan saling terkoneksi satu dengan lainnya. Kerangka analisis gender Naila Kabeer dapat 1) menganalisis ketimpangan gender yang ada di dalam distribusi sumber daya, tanggung jawab dan kekuasaan, 2) menganalisis relasi antara orang, relasi mereka dengan sumber daya, aktivitas dan bagaimana posisi mereka melalui lensa kelembagaan mulai dari unit terkecil. Dalam kerangka analisis gender Naila Kabeer, kelembagaan perlu diidentifikasi apakah memproduksi ketimpangan atau ketidakadilan gender. Dengan menggunakan kerangka pikir tersebut maka kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan nelayan dapat terurai jelas. Penelitian juga hendak menunjukkan bahwa meski menghadapi persoalan berlapis (keluarga-komunitas-pasar-negara) perempuan nelayan masih memiliki daya untuk bertahan dalam situasi tersebut. Pendekatan analisis gender Kabeer pada praktiknya tidak dapat berdiri sendiri, dalam penelitian ini

penulis menggunakan pemikiran Mooser (1993), Nelson (1992), Collins (1995) dan Nusbaumm (1995; 1999; 2000) untuk membongkar ketidakadilan gender yang ada di dalam masyarakat pesisir.

Perjuangan Puspita Bahari: Melawan Birokrasi dan Tafsir Agama yang Bias

Puspita Bahari didirikan pada tahun 2005 di tengah-tengah dominasi laki-laki atas ruang publik dan kekerasan terhadap perempuan nelayan. Tak ada yang menyangka bahwa dalam prosesnya hingga 12 tahun kemudian, Puspita Bahari mampu menerobos fondasi tersebut, melawan dalil-dalil ulama, melawan stigma dan melawan pemiskinan perempuan nelayan. Puspita Bahari tumbuh di dalam kompleksitas situasi ekonomi, sosial dan budaya yang rumit dengan tujuan memberdayakan dan meningkatkan perekonomian keluarga.

Kegiatan ekonomi Puspita Bahari adalah pertama aktivitas pascaproduksi, bidang ekonomi, yakni membuat kerupuk ikan, tepung ikan, terasi, ikan asin, pengasapan dan makanan-makanan dari hasil laut; kedua aktivitas praproduksi, mendirikan koperasi simpan-pinjam sebagai soko guru komunitas pinjam dan menyediakan kebutuhan melaut; ketiga, produksi ikan tangkap, mereka mempunyai alat produksi berupa perahu yang digunakan oleh para suami dari ibu-ibu anggota Puspita Bahari, dengan pengelolaan tetap di bawah Puspita Bahari (LBH-Semarang 2011). Inisiatif ekonomi yang dilakukan Puspita Bahari di atas telah membuat rantai produksi sendiri di wilayah Morodemak. Mulai dari perahu, alat penangkapan dan pengolahan ikan telah dimiliki, kegiatan produksi juga dapat dilakukan sendiri, tidak bergantung pada korporasi besar. Namun sayangnya inisiatif ekonomi yang dilakukan tersebut masih mengalami tantangan seperti stigma dari masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga dan tafsir agama yang bias gender.

Inisiatif ekonomi yang dilakukan Puspita Bahari bukan hanya memajukan perekonomian di wilayah Demak tapi juga otomatis berkontribusi pada peningkatan produksi perikanan Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam Nawacita (9 Janji Presiden Jokowi) memandatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memerangi praktik pencurian ikan dan mengembalikan uang negara dari tangan mafia perikanan. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menargetkan adanya kenaikan produksi hingga 19 juta ton, baik dari perikanan tangkap maupun budi daya. Artinya persoalan perikanan perlu diberikan perhatian serius oleh negara dan peran Puspita Bahari dalam memproduksi hasil tangkapan laut menjadi penting.

Meskipun menjadi perhatian serius, sayangnya di dalam kebijakan publik, negara mendefinisikan nelayan secara sempit. UU No. 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kebijakan tersebut lahir karena masih adanya stereotip gender bahwa nelayan adalah laki-laki, sehingga definisi nelayan di atas tidak dapat mengakomodasi perempuan nelayan yang sesungguhnya memiliki peran besar dalam perekonomian masyarakat pesisir misalnya perempuan pengumpul ikan, perempuan yang menjual ikan setelah hasil tangkapan datang dan perempuan yang mengolah hasil tangkapan menjadi produk perikanan lainnya. Maka jika merujuk pada definisi tersebut, para perempuan yang tergabung dalam Puspita Bahari tidak dapat disebut sebagai nelayan hanya karena perempuan tidak pergi ke laut menangkap ikan, padahal Puspita Bahari memiliki kapal, alat tangkap dan tempat pengelolaan hasil tangkapan. Definisi sempit tersebut akhirnya membuat kerja-kerja perempuan nelayan melalui Puspita Bahari tereksklusi dari kebijakan publik.

Masnuah, pendiri Puspita Bahari berpendapat bahwa penting untuk memberikan pengakuan kepada perempuan nelayan. Bagi Masnuah seseorang yang dapat disebut nelayan bukan hanya yang mencari ikan ke laut tapi juga yang melakukan aktivitas produksi hasil tangkapan. Dengan demikian aktivitas yang selama ini banyak dilakukan oleh perempuan di pesisir seperti mengolah, memasarkan hasil tangkapan laut dapat disebut sebagai kerja-kerja nelayan. Masnuah juga mengakui bahwa kesadaran akan pentingnya pengakuan terhadap profesi perempuan sebagai nelayan belum dimiliki oleh semua perempuan nelayan. Konstruksi bahwa nelayan adalah lak-laki juga tertanam dalam diri perempuan.

> Ketika perempuan itu melakukan aktivitas yang mendukung sektor perikanan, contoh saya dari kecil sudah ikut untuk pengolahan mengeringkan ikan, bekerja di pengusaha-pengusaha yang mengolah ikan, tapi sampai sedewasa ini, saya belum menemukan pengakuan perempuan nelayan dari diri perempuan itu sendiri. Perempuan nelayan ada beberapa versi, dari perempuan nelayan yang mencari ikan di laut, perempuan nelayan pembudidaya, petambak garam, bahkan ada perempuan nelayan pengolah sampai pemasar. Dan itu belum diakui oleh negara sebagai perempuan nelayan yang harus diakui hak-haknya. Sampai sekarang yang masih diakui adalah laki-laki, bahwa yang disebut nelayan hanya laki-laki, karena hanya laki-laki yang bisa melaut. (Masnuah 2017, wawancara 3 September).

Dalam kerangka analisis gender Kabeer, perempuan nelayan sebagai seorang individu memiliki relasi timbal balik dan saling memengaruhi dengan komponen lainnya seperti keluarga, masyarakat, komunitas dan negara. Relasi tersebut yang kemudian menjadi faktor perempuan nelayan tidak mendapatkan akses program pembangunan yang diperuntukkan bagi nelayan yaitu kartu nelayan dan asuransi nelayan. Masnuah menjelaskan bahwa pengakuan terhadap profesi perempuan sebagai nelayan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuka akses perempuan terhadap program-program kesejahteraan bagi nelayan.

> Kalau perempuan sudah diakui sebagai nelayan, maka akses untuk kartu nelayan, asuransi dan program-program yang selama ini diperuntukkan bagi laki-laki nelayan, bisa didapat oleh perempuan nelayan. Juga menuntut kepada akses perempuan nelayan itu sendiri, termasuk hak-hak perlindungan nelayan karena sebetulnya UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Petambak Garam dan Pembudidaya Ikan itu sebetulnya belum menyentuh perempuan nelayan, dan secara praktik belum diimplementasikan dengan baik, baru di atas kertas saja. (Masnuah 2017, wawancara 3 September)

Moser mengklasifikasikan kebutuhan gender guna membantu negara dalam melakukan perencanaan program baik kebijakan nasional maupun daerah yaitu kebutuhan gender strategis dan praktis. Kebutuhan gender yang strategis adalah kebutuhan perempuan dengan mengidentifikasi posisi perempuan dalam masyarakat yang selama ini lebih rendah daripada laki-laki. Kebutuhan gender strategis bervariasi sesuai dengan konteks tertentu, yaitu berkaitan dengan pembagian kerja, kekuasaan, akses dan kontrol, serta isu-isu seperti hak legal, kekerasan dalam rumah tangga, upah yang setara dan kontrol perempuan terhadap tubuh mereka. Memenuhi kebutuhan gender strategis membantu perempuan mencapai kesetaraan (Moser 1993, h. 39). Kebutuhan gender praktis tidak mempersoalkan pembagian kerja berdasarkan gender atau posisi perempuan yang rendah di dalam masyarakat. Kebutuhan gender praktis adalah respons terhadap kebutuhan perempuan yang dapat dipenuhi secara langsung dan cepat yaitu dengan memerhatikan kondisi hidup perempuan yang tidak layak seperti penyediaan air, perawatan kesehatan dan pekerjaan (Moser 1993, h. 40).

Dengan menggunakan alat analisis yang ditawarkan Moser, maka pengakuan profesi perempuan sebagai nelayan merupakan kebutuhan strategis gender yang harus dipenuhi. Pengakuan perempuan sebagai nelayan sangat berkaitan dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan program pembangunan yaitu kartu nelayan dan asuransi nelayan serta pelatihan-pelatihan. Kebutuhan strategis gender yang terabaikan tersebut sangat berkaitan dengan kekuasaan dan paradigma pembangunan yang sebelumnya tidak menggunakan perencanaan berbasis gender yaitu: melihat kebutuhan praktis dan strategis gender. Dalam konteks masyarakat di Kabupaten Demak (Desa Morodemak dan Desa Purworejo), cara pandang masyarakat terhadap pengakuan perempuan nelayan bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang bias namun juga dipengaruhi oleh tafsir agama yang bias gender. Aktivisme yang selama ini dilakukan Puspita Bahari kerap mendapatkan label-label negatif dari tokoh agama setempat. Puspita Bahari sebagai organisasi perempuan nelayan yang sangat aktif memberdayakan ekonomi dan memberikan pengetahuan pada perempuan nelayan pun harus mendapatkan stigma negatif. Masnuah menceritakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Puspita Bahari bukan hanya kebijakan yang bias namun juga cara pandang masyarakat, khususnya tokoh agama yang bias terhadap gerakan perempuan.

> Puspita Bahari mendapat penghargaan Frans Seda Award di bidang kemanusiaan dari Unika Atma Jaya, penghargaan ini ada kesan luar biasa, kami sempat putus asa untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Kami sempat mendapat kendala ketika juri, Slamet Effendi Yusuf dari PBNU Pusat, dan juri dari Unika Atma Jaya menilai kami di lapangan. Juri menemukan pendapat dari tokoh-tokoh agama di masyarakat bahwa Puspita Bahari itu gak ada manfaatnya, pada hari itu, organisasi perempuan nelayan yang tidak sewajarnya, sehingga kami sudah putus asa. Namun akhirnya kami menang, karena kata Pak Slamet tantangan yang dihadapi Puspita Bahari sangat berat yaitu tafsir agama. (Masnuah 2017, wawancara 3 September)

Hal yang lebih mengerikan lagi adalah ketika perpaduan pemahaman kebijakan yang lemah-bias dan tafsir agama yang bias ditemukan dalam pemikiran pejabat publik. Pada tanggal 4 September Forum Nelayan Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Jawa Tengah di kantor DPRD Jawa Tengah. Pada audiensi tersebut juga turut hadir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Dalam audiensi tersebut Masnuah hanya satu-satunya perempuan yang hadir sebagai perwakilan Forum Nelayan Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut Masnuah mengungkapkan bahwa penting untuk memberikan pengakuan terhadap perempuan nelayan, ia juga meminta kepada dinas-dinas terkait untuk membantu proses perubahan status

pekerjaan perempuan nelayan yang sebelumnya adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) menjadi nelayan di KTP. Namun seperti yang diungkapkan Kabeer bahwa relasi antar komponen sosial saling tumpang tindih, kebijakan yang bias diperkuat dengan pandangan pejabat publik yang bias, maka tembok ketidakadilan semakin tebal. Pemahaman terhadap tafsir agama yang bias membuat cara pandang pejabat publik juga menjadi bias. Padahal seharusnya pejabat publik memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan fakta dan situasi yang ada, bukan malah menggunakan dalil-dalil agama yang sesungguhnya tidak ada korelasinya dengan situasi pemenuhan hak perempuan nelayan, seperti diungkapkan seorang Anggota Komisi B, DPRD Jateng.

> Indonesia ini kan yang berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya sebagai negara yang memiliki filosofi tentang ketuhanan itu memang perlu diperhatikan, bahwa perempuan itu jangan diposisikan pada posisi yang begitu nista, mohon maaf ya, ini sekaligus pencerahan. Ketika perempuan-perempuan itu ingin menjadi nelayan, tapi pantaskah kalau ada laki-laki yang melakukan aktivitas seperti itu, perempuan juga masuk dalam hal itu. Memang perlu menempatkan perempuan itu *sing* pada posisi yang seperti itu, ke laut, mencari ikan, sementara suaminya ongkang-ongkang, ini kan semakin gak *genah* ini, ngeganggu, dunia sudah terbalik. Agama kita (baca: Islam) menganjurkan untuk menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Karena itu saya memang mengapresiasi yang dilakukan perempuan untuk emansipasi tetapi pada porsi. (R 2017, audiensi 4 September)

Pernyataan anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah itu tidak berlandaskan pada fakta bahwa ada perempuan yang melaut karena tuntutan ekonomi keluarga. Pernyataan tersebut bukan hanya bias gender tapi juga bias kelas. Anggota Komisi B tersebut memperbandingkan dirinya yang mengizinkan istrinya bekerja namun tetap memberikan nafkah dengan situasi masyarakat nelayan yang hidup dalam garis kemiskinan tanpa pilihan. Sungguh sangat disayangkan pernyataan tersebut keluar dari mulut seorang pejabat publik. Bukannya melihat situasi dan fakta di lapangan, tapi dengan arogan menganggap aktivisme yang dilakukan Puspita Bahari sudah kelewat batas: yaitu meminta pengakuan perempuan sebagai nelayan.

> Kalau di dalam UU No. 7 tahun 2016, yang mungkin mbak Masnuah hapal, kalau perempuan itu diakui, kalau gak salah dalam catatan saya, perempuan itu ada dalam kata begini: Rumah Tangga Nelayan, sehingga pengakuannya itu adalah sebagai keluarga nelayan. Nah di dalam UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, juga barang kali perlu dikritisi, bahwa *janjane* UU itu dibentuk *janjane* sudah ada filosofinya, begitu bos? Indonesia itukan negara yang mayoritas masyarakatnya muslim. Jadi mbak masnuah itu tidak sekadar pokoknya, pokoknya. Tetapi tidak berpikir tentang eksistensi dan aspek filosfi terhadap perempuan di Indonesia, kita tidak ingin terjebak pada kondisi negara-negara yang kadang-kadang emansipasi itu sembarang gitu." (R 2017, audiensi 4 September)

Konstruksi sosial terhadap dikotomi kerja produksi dan nonproduksi, pasar dan nonpasar telah mengakar dan diperkuat oleh tafsir agama yang bias. Hal tersebut bukan hanya tercermin pada UU No. 7 tahun 2016 namun juga tercermin pada cara berpikir pejabat publik kita, keberadaan perempuan nelayan dianggap sebagai fenomena yang langka, padahal keberadaan perempuan nelayan adalah fakta sosial yang perlu diakui dan diberikan akses kepada program pemberdayaan nelayan. Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Mei 2014, sedikitnya 56 juta orang terlibat di dalam aktivitas perikanan, yaitu mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan. Dari jumlah itu, sekitar 39 juta orang adalah perempuan nelayan. Pendapat yang disampaikan oleh pejabat publik di atas jelas tidak berangkat dari situasi masyarakat pesisir, yaitu bahwa perempuan juga menjadi agen ekonomi. Alih-alih memosisikan perempuan di tempat yang "mulia" justru sebenarnya menutup mata terhadap eksistensi dan aktivitas produksi perempuan nelayan.

Cara pandang yang bias bukan hanya ada di tingkat provinsi, di level desa, hal tersebut juga ditemukan. Anggapan bahwa perempuan nelayan yang melaut hanya membantu suami seringkali melahirkan pandangan bahwa perempuan tidak melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Pada tanggal 4 September 2017, perempuan nelayan dari dusun Tambak Polo Desa Purworejo mendatangi Kepala Desa Purworejo untuk mengajukan perubahan status pekerjaan di KTP yang sebelumnya ibu rumah tangga menjadi nelayan dengan menyerahkan berkas (Kartu Keluarga dan KTP). Namun sayangnya para ibu yang telah menempuh perjalanan jauh dari dusun harus menghadapi kenyataan pahit karena tidak satu pun berkas yang mereka ajukan diterima. Sang Kepala Desa tidak memberikan keputusan yang jelas mengenai proses ini dan malah mengatakan bahwa istri nelayan hanya membantu suaminya saja.

> Kami belum bisa memastikan ya atau tidak, kami ingin berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan apakah memang profesi ibu nelayan, perempuan nelayan itu, bisa masuk dalam kategori nelayan, yang kedua kami konfirmasi ke Disdukcapil, yang ketiga kami konfimasi ke DKP, apakah ibu-ibu yang dalam tanda

> petik membantu bapaknya ke laut apakah (termasuk) kategori nelayan, karena secara harfiah bahwa nelayan itu adalah orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan, tapi pertanyaan selanjutnya apakah ibu-ibu itu menganggap mata pencaharian itu sebagai mata pencaharian utama, karena berdasarkan data yang kami terima bahwa ibu-ibu hanya sekadar membantu, bahasa membantu itu kan bukan mata pencaharian ... karena di daerah kita ibu-ibu hanya membantu ... kalau ABK aktif itu dia melakukan kegiatan sebagai mata pencahariannya. (Lurah Purworejo 2017, audiensi 4 September 2017)

Dari tanggapan Lurah di atas terlihat bahwa birokrasi yang bias adalah perwujudan dari pemikiran pejabat publik yang bias. Tak heran akses perempuan terhadap program pembangunan tidak ada, bahkan menyoal wujud identitas yang paling dasar saja perempuan terabaikan secara struktural.

> Saya ingin bilang bahwa kemaritiman yang ada perempuan nelayan dan laki-laki nelayan gak akan bangsa maritim bisa dicapai kalau hanya memberdayakan laki-laki nelayan, jadi secara 50% pun perempuan nelayan terlibat dalam sektor perikanan, maka saya meminta langsung kepada pak Jokowi terkait advokasi kami untuk mendorong pengakuan terhadap perempuan nelayan mendapat hak yang sama, maka saya akan meminta pak jokowi untuk memberikan perintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh Indonesia untuk mengeluarkan kartu nelayan dan asuransi nelayan untuk perempuan nelayan. (Masnuah 2017, wawancara 3 September)

Bagi Kabeer persoalan kemiskinan adalah akibat dari ketiadakadilan gender di dalam masyarakat, adanya relasi gender di dalam masyarakat yang saling tumpang tindih dan memengaruhi yang kemudian melahirkan ketidakadilan struktural (Kabeer 1994, h. 141). Menurutnya pembangunan tidak sekadar perbaikan ekonomi, tapi juga kelangsungan hidup, keamanan, otonomi (kemampuan terlibat, akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan). Hal yang dilakukan Puspita Bahari adalah mencoba menerobos dinding-dinding birokrasi dan masyarakat yang bias, sehingga keadilan untuk perempuan nelayan bisa terwujud, bagi Masnuah pengakuan terhadap perempuan nelayan bukan hanya tentang persoalan akses dan kontrol tapi juga soal eksistensi dan harga diri (baca: otonomi). Masnuah dalam audiensi dengan Komisi B DPRD Jateng mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja di sektor perikanan sangat bangga disebut sebagai nelayan, pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang mulia. Maka mengakui perempuan sebagai nelayan dan memberikan akses terhadap program pembangunan menurutnya adalah sama dengan memosisikan perempuan pada tempat yang mulia.

Wong Wedok Miyang: Perempuan-Perempuan yang Melaut

Pada sebuah diskusi yang diselenggarakan *Jurnal Perempuan*, Rahma Iryanti, Deputi Bidang Ketenagakerjaan Bappenas memaparkan data-data statistik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia. Salah satu pernyataan yang ia lontarkan adalah, TPAK perempuan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Dengan demikian Indonesia menurutnya perlu model ekonomi inklusif, artinya model ekonomi yang bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada penduduk, angkatan kerja, penduduk kurang mampu dan sebagainya. Lebih jauh Rahma juga memaparkan bahwa *Gross Domestic Product* (GDP)[2] per kapita Indonesia sudah cukup meningkat, cukup baik sekali menurutnya[3]. Begitulah kira-kira gambaran percakapan-percakapan tentang isu kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, narasi-narasi besar, GDP, pertumbuhan ekonomi dan soal TPAK. Meskipun sudah ada data terpilah yang disajikan, namun tidak dilihat lebih jauh apa yang terjadi dibalik angka-angka tersebut, siapa yang menjadi aktor pertumbuhan ekonomi, berapa besar kesenjangan ekonomi yang ada, dan seperti apa wajah kemiskinan itu. Di balik angka-angka statistik yang ada, sebenarnya kita tahu setiap manusia yang diukur bukanlah entitas yang tunggal dan sama, semuanya saling terkait dan memiliki berbagai persoalan dan pengalaman kerja yang unik. Negara lupa bahwa di balik ukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ada kerja-kerja yang tidak masuk dalam ukuran tersebut, yaitu kerja-kerja produksi perempuan nelayan yang tidak diakui sebagai nelayan dan kerja-kerja domestik perempuan nelayan. Mengapa demikian? Dengan tidak diakuinya perempuan nelayan secara administratif maka kerja-kerja yang dilakukan perempuan nelayan pun tidak tercatat dalam statistik nasional.

Ibu Zarokah, adalah salah satu perempuan nelayan di Desa Morodemak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Ia adalah nelayan kecil yang telah 2,5 tahun pergi melaut bersama suaminya, bapak Subeki, alasannya karena suaminya tidak ditemani ABK (Anak Buah Kapal) sehingga harus melaut sendiri. Tekadnya menemani suami karena alasan ekonomi, sebab jika harus mencari ABK maka hasil tangkapan harus dibagi, sedangkan jika ia yang berangkat melaut menggantikan peran ABK maka seluruh hasil tangkapan masuk dalam rumah tangga bu Zarokah.

> Bapaknya gak ada temennya, kasihan mbak. Kalau sendiri kan narik sana narik sini, ya kalau ditemenin kan ada yang narik situ sendiri, di sini sendiri, biar agak ringan tenaganya bapak. (Zarokah 2017, wawancara 3 September)

Peneliti berkesempatan mengikuti aktivitas Ibu Zarakoh pada 3 September 2017. Peneliti mencatat apa-apa saja yang dilakukan Ibu Zarokah selama proses melaut. Mulai dari jam 3.30 WIB hingga 9.30 WIB, mulai dari rumah hingga selesai melakukan penjualan ikan hasil tangkapan yaitu ikan Kelapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berikut adalah tabel profil aktivitas yang diolah dari hasil pengamatan peneliti.

Tabel 1. Profil Aktivitas Ibu Zarokah dan Pak Subeki

Aktivitas Produksi (Pasar)	Bu Zarokah	Pak Subeki
Menyiapkan Kapal	✓	✓
Menyalakan Mesin		✓
Mengemudikan Kapal		✓
Membuang Air dari Dek Kapal	✓	
Menyiapkan Jaring	✓	
Menebar Jaring	✓	
Menarik Jaring	✓	✓
Memisahkan Ikan dari Jaring	✓	✓
Mengangkut Ikan ke Bakulan	✓	✓
Menjual Ikan	✓	
Membersihkan Kapal	✓	✓
Aktivitas Produksi (nonpasar)		
Memasak	✓	
Menyiapkan Makanan dari Rumah	✓	
Menyiapkan Peralatan Melaut	✓	✓
Mengangkut Perbekalan	✓	✓
Menyiapkan Makanan di Kapal	✓	
Menyiapkan Makanan dari Rumah	✓	
Aktivitas Reproduksi		
Melahirkan	✓	
Merawat Anak	✓	
Aktivitas Sosial Kemasyarakatan		
Puspita Bahari	✓	

Sumber: Diolah dari hasil observasi penulis dan wawancara dengan Zarokah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya perempuan nelayan lebih banyak melakukan kerja produksi dan nonproduksi, namun perempuan tidak mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Mengapa demikian? Persoalannya adalah adanya dikotomi kerja produksi-reproduksi, domestik-bukan domestik, atau kerja upahan/bukan upahan di dalam masyarakat. Dikotomi-dikotomi tersebut menurut Saptari & Holzner (2016) berguna karena untuk pertama kalinya mulai disoroti bagian dari kerja perempuan yang selama ini tidak terlihat. Kerja reproduksi perempuan terutama yang menyangkut pengasuhan anak dan kerja domestik lainnya, yang oleh masyarakat patriarki dianggap bukan sebagai bentuk kerja. Akibat tidak terlihatnya kerja-kerja perempuan secara jelas, maka kerja upahan perempuan di luar rumah dianggap sebagai kerja sampingan dan akhirnya mengakibatkan pengecilan arti kerja—yang dilakukan perempuan (Saptari & Holzner 2016, h. 47). Dalam konteks masyarakat pesisir, perempuan nelayan masih dianggap sekadar 'membantu' suami pergi melaut.

Peneliti mengikuti aktivitas melaut bu Zarokah dan suami, pada hari itu mereka hanya mendapatkan ikan Kelapan sebanyak satu bak, dengan harga jual Rp 170.000,00. Menurut bu Zarokah pendapatannya hari itu digunakan untuk membeli solar Rp 50.000, untuk

makan, untuk rokok bapak, untuk jajan anak, untuk sekolah anak. Ketika ditanya soal biaya keperluannya sendiri, bu Zarokah menjawab tidak ada keperluan khusus, hanya sesekali jajan bakso. Dalam berbagai laporan penelitian menunjukkan bahwa perempuan membelanjakan penghasilannya untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk makanan, kebutuhan suami dan anak-anaknya (Saptari & Holzner 2016, h. 214). Uang tunai di tangan perempuan sering berarti perbaikan gizi dan pendidikan bagi anak-anak (Tellis-Nayak dikutip dalam Saptari & Holzner 2016, h. 214).

Di desa Morodemak, bukan hanya bu Zarokah yang pergi melaut bersama suaminya, bu Surotun adalah perempuan nelayan yang juga pergi melaut. Bu Surotun pergi melaut bersama suami sejak tiga tahun yang lalu, di kapal ia bertugas sebagai juru mudi dan menebar jaring. Faktor ekonomi menjadi alasan utama perempuan melaut bersama suaminya. Kini bu Surotun dan bu Zarokah ingin diakui sebagai nelayan.

> Bangun pagi jam 2, masak dulu, terus membuat bekal untuk berdua, terus kita mulai berjalan ke laut, terus sampai sana jam 4, lalu nebar jaring setengah jam diangkat, kadang dapat ikan kadang enggak. Gak mesti mbak, kadang jam 10, kadang jam 11, kadang jam 1 kira-kira. Saya pegang kemudi, lalu nebar jaring. Bapaknya nebar jaring juga di atas dan di bawah. (Surotun 2017, wawancara 4 September)
>
> Awalnya bapaknya kan mau pergi ke laut sendiri, saya bilang jangan pak, kok dewekan. Ayok karo aku. Kata dia koe kalau mabok piye? Saya jawab, ora-ora mabok. Kalau mabok mulihnya kuwi? Eh malahan tidak mabok. (Surotun 2017, wawancara 4 September)
>
> Terjemahan:
>
> Awalnya bapaknya kan mau pergi ke laut sendiri, saya bilang jangan pak, kok sendirian. Ayo saya temani. Kata dia nanti kalau mabok bagaimana. Saya jawab, enggak kok pak enggak mabok. Kalau mabok pulangnya gimana? Eh ternyata setelah ikut melaut gak mabok. (Surotun 2017, wawancara 4 September)

Kesadaran akan pentingnya pengakuan sebagai perempuan nelayan dimiliki oleh bu Surotun. Kemiskinan yang harus dihadapi mendorong ia pergi melaut bersama suaminya, meski sekilas kita melihat bahwa alasan bu Zarokah dan bu Surotun serupa yaitu 'menemani suami', namun bukan berarti tidak ada alasan ekonomi dan alasan pembagian pendapatan. Bu surotun bahkan bekerja lagi setelah pulang melaut sebagai pedagang makanan.

> Ya mau diakui sebagai nelayan, soalnya kan suamiku dan aku kan sama-sama melaut, lah berat saya, tambah ngurus suami, anak, PRT, jualan juga, jualan martabak, mi ayam, es puter. Di rumah setelah pulang, ngurus anak dulu, masak-masak, jam 3 saya sudah keluar menjual mi ayam, martabak, di depan rumah sendiri, sampai jam 9 malam. Lalu bangun lagi jam 2. ya gimana lagi. Saya kerja (lebih) banyak saya daripada suami. (Surotun 2017, wawancara 4 September)

Tabel 2. Profil Aktivitas Surotun & Suami (Telah 3,5 tahun melaut)

Aktivitas Produksi	Bu Surotun	Suami
Melaut	✓	✓
Menjual Ikan ke TPI	✓	
Bekerja sebagai PRT	✓	
Berjualan Mie Ayam	✓	
Berjualan Martabak	✓	
Aktivitas Produksi (nonpasar)		
Memasak	✓	
Menyiapkan Makanan dari Rumah	✓	
Menyiapkan Peralatan Melaut	✓	✓
Mencuci di Rumah	✓	
Aktivitas Reproduksi		
Melahirkan	✓	
Merawat Anak	✓	
Aktivitas Sosial Kemasyarakatan		
Puspita Bahari	✓	

Sumber: Diolah dari hasil wawancara penulis dengan Surotun.

Selain di desa Morodemak, perempuan nelayan yang pergi melaut juga ditemui di Desa Purworejo Dusun Tambak Polo, berdasarkan temuan Puspita Bahari yang disampaikan oleh Masnuah dalam Audiensi Forum Nelayan Jawa Tengah dengan Komisi B DPRD Jawa Tengah. Perempuan yang melaut bukanlah fenomena yang tiba-tiba ada, di Dusun Tambak Polo Desa Purworejo hampir 40 orang perempuan pergi ke laut bersama suaminya. Sedangkan berdasarkan temuan penulis saat mendampingi perempuan dari dusun Tambak Polo audiensi dengan Kepala Desa Purworejo, ada 25 berkas (Kartu Keluarga dan KTP) perempuan Dusun Tambak Polo yang mengajukan perubahan status pekerjaan dari ibu rumah tangga menjadi nelayan. Data ini masih bisa berubah karena akan ada pengorganisasian lebih lanjut.

> Persoalan yang ingin kami sampaikan mewakili Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia, hari ini kami juga memiliki data bahwa ada perempuan yang melaut di wilayah Desa Morodemak dan Purworejo, Kabupaten Demak. Ada sekitar kurang lebih 40 perempuan nelayan yang melaut, seperti yang disampaikan mas Karman tadi, seminggu yang lalu kami melakukan Forum Warga Tri Desa, Morodemak, Purworejo dan Margo Linduk, kami duduk bersama dengan kepala desa, (aparat) kecamatan, Disdukcapil, DKP. Nah saya tahu kenapa dari DKP mengirim dari bidang pemasaran produksi perikanan, karena dipikir kalau perempuan adalah urusan masak-memasak tapi ketika DKP mendengar cerita langsung dari perempuan-perempuan yang melaut itu mereka agak kaget ya, ibu-ibu ini melaut toh kerjanya. (Masnuah 2017, wawancara 4 September)

Bu Kiswati, perempuan nelayan yang peneliti temui mengakui bahwa kerja-kerja yang ia lakukan sangat banyak, seperti melaut, memasak, mencuci, menjual ikan. Dari pernyataan bu Kiswati kita bisa mengetahui bahwa perempuan memiliki beban ganda dalam kerja produksi dan reproduksinya. Batasan antara satu jenis pekerjaan dengan lainnya tidak selalu tajam. Dalam kenyataannya seseorang bisa melakukan kerja upahan (produksi) dan kerja bukan upahan sekaligus sehingga ia bisa berada dalam hubungan kerja yang berbeda-beda (Saptari & Holzner 2016, h. 24). Aktivitas bu Kiswati sebagai perempuan nelayan bukan hanya aktivitas produksi namun juga reproduksi, kedua aktivitas tersebut dilakukannya dalam satu waktu. Seperti yang diungkapkan bu Kiswati yang melakukan aktivitas produksi bersamaan dengan aktivitas reproduksi.

> Mulai bangun jam 1 pagi, memasak, membawa bekal yang nanti akan dibawa ke laut, mempersiapkan anak-anak di rumah. Jam 3 berangkat, kalau melautnya jauh berangkat jam 3, kalau dekat jam 4, kan musimnya gak tentu, kadang ikannya dekat kadang jauh. Kalau berangkat jam 4, ya sampai di laut jam 5 atau jam 6, nebar jaring, sekitar jam 8 jaringnya diambat, *nyampe* ke rumah paling sebentar itu jam 9, kadang-kadang jam 10. Sampai rumah itu gak terus istirahat, saya punya kegiatan lagi, membakul, beli tangkapannya saudara dan teman-teman. Kalau saya bakulan itu saya bareng sama masak, *nyuci*. Bakulannya pakai timbangan semua, jadi ikan di timbang, sama saya *nyuci* dan masak, kalau ada yang jual berhenti, melayani yang jual. Kadang-kadang masakan saya sering gosong, kadang ramai-ramai orang yang jual, saya lupa makanya masakannya sering gosong. Nanti *nyuci*nya itu sampai jam 12, sudah bedug saya buru-buru ke TPI, untuk jual ikan itu, yang saya beli dari nelayan. Dulu saya *nyampe* bisa jatuh karena keburu-buru ke TPI jatuh terpeleset di lantai. (Kiswati 2017, wawancara 2 September)

Berikut profil aktivitas bu Kiswati dan suaminya, dalam tabel di bawah dapat dilihat bahwa kerja-kerja yang dilakukan bu Kiswati lebih banyak daripada suaminya. Ia sebagai perempuan nelayan sesungguhnya adalah agen ekonomi yang utama dalam rumah tangga.

Tabel 3. Profil Aktivitas Kiswati & Suami (Telah 3 tahun melaut)

Aktivitas Produksi	Bu Kiswati	Suami
Melaut	✓	✓
Bakulan (membeli ikan hasil tangkapan nelayan kecil)	✓	
Menjual Ikan ke TPI	✓	
Aktivitas Nonproduksi		
Memasak	✓	
Menyiapkan Makanan dari Rumah	✓	✓
Menyiapkan Peralatan Melaut	✓	✓
Mencuci di Rumah	✓	
Aktivitas Reproduksi		
Melahirkan	✓	
Merawat Anak	✓	
Aktivitas Sosial Kemasyarakatan		
Puspita Bahari	✓	

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Kiswati.

Aktivitas bu Kiswati selain melaut adalah *bakulan*, yaitu membeli ikan hasil tangkapan nelayan kecil kemudian dijual kembali ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Ia menjelaskan bahwa suaminya tidak bisa naik motor, maka ia ditemani oleh anak atau naik ojek. Di sela-sela aktivitas produksinya ia juga mengerjakan kerja-kerja domestiknya yang begitu banyak. Terlihat bahwa beban kerja perempuan nelayan lebih besar dari laki-laki nelayan. Salah satu dimensi dalam analisis Kabeer adalah aktivitas yaitu beranjak dari pertanyaan siapa yang melakukan apa? Profil aktivitas bu Kiswati memperlihatkan bahwa aktivitas produksi lebih banyak dilakukan olehnya dengan menanggung segala risiko.

Aktivitas melaut bukanlah pekerjaan tanpa risiko, tentu risiko seperti tenggelam, ombak dan hujan besar sudah diketahui oleh para perempuan nelayan. Namun tekad mereka untuk melaut tetap tidak surut, hal itu terlihat pada tekad bu Kustiah, perempuan nelayan dari Dusun Tambak Polo.

> Udah 8 tahun melaut. Dari pagi, bangun tidur jam 1, berangkat ke laut, jam 2. Jam 3 tawur jaring, jam 5 *ngambat*[4] jaring, jam 6 berangkat pulang, jam 11 sampai rumah. Bapak yang melemparkan jaring, saya kemudi kapal. Kalau narik jaring ya sama, bapaknya dibagian sana, saya narik jarik, ngambat. (Kustiah 2017, wawancara 2 September)

> Iya berani soalnya bapaknya gak ada temennya. Saya ikut temani bapaknya ke laut. Saya pernah tenggelam ke laut, saya sampai ketakutan gak mau ikut ke laut, tapi saya terpaksa ikut lagi soalnya suami gak ada yang menemani, sendirian, lah begitulah. Saya sempat *gondeli* kapal yang nabrak saya, saya ditarik kapal yang nabrak saya. (Kustiah 2017, wawancara 2 September)

Hasil wawancara peneliti dengan perempuan nelayan yang pergi ke laut/*miyang* di Desa Morodemak dan Dusun Tambak Polo Desa Purworejo menunjukkan bahwa keberadaan perempuan yang melaut adalah nyata dan kerja-kerja yang dilakukan perempuan lebih banyak daripada laki-laki nelayan. Profil aktivitas seperti di atas dapat membantu kita mengidentifkasi aktivitas yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Dalam analisis gender Naila Kabeer, prinsip analisis dalam melihat kebutuhan untuk program pembangunan adalah: *who does what?, who gets what?, who gains?, who loses?, which men?, which women?* (Kabeer 1994, h. 311). Profil aktivitas di atas memperlihatkan kerja-kerja yang dilakukan perempuan yang selama ini tidak terlihat dan tidak terhitung, baik kerja-kerja produksi maupun reproduksi.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa perempuan nelayan memiliki berbagai persoalan di ruang domestik sebagai pekerja dan di ruang publik sebagai pekerja. Julie A. Nelson menulis sebuah esai yang berjudul "Feminist Economics"[5] dan "Feminism and Economics", dalam kedua artikelnya Nelson menggugat bahwa disiplin ekonomi adalah disiplin yang maskulin, yang mengabaikan kualitas feminin dan ia melihat bahwa ilmu ekonomi masih jauh dari objektivitas. Studi ekonomi menurutnya hanya fokus pada kerja-kerja yang dilakukan oleh laki-laki, sedangkan kerja-kerja produksi di dalam rumah—yang dikerjakan oleh perempuan tidak masuk dalam perhitungan statistik nasional. Harper Collins dalam ulasannya tentang tulisan Marilyn Waring *If Women Counted: A New Feminist Economics*, ia

mengemukakan pandangan Waring bahwa GDP secara sistematis tidak merekognisi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan bagi Waring memiliki peran penting di dalam bidang rumah tangga seperti merawat anak atau merawat orang lanjut usia dan hal ini terjadi di seluruh dunia. Pekerjaan rumah tangga seperti ini secara ekonomi sangatlah berperan penting bagi suatu negara karena dianggap dapat menjamin terus tersedianya sumber daya manusia untuk memproduksi suatu produk. Tetapi kebanyakan, pekerjaan yang banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga ini tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP (Collins 1992).

Sedangkan menurut Moser, definisi peran produktif dalam keluarga perlu diperluas, ia berargumen bahwa peran produksi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang mendapatkan upah atau kompensasi tukar tertentu. Hal tersebut menurut Moser mencakup kerja produksi pasar dengan nilai tukar, dan produksi subsisten/rumah tangga dengan nilai guna, nilai tukar potensial bagi perempuan dalam produksi pertanian ini termasuk bekerja sebagai petani mandiri, istri petani dan pekerja upahan (Moser 1993, h. 31). Analisis Moser memberikan ruang pada perempuan nelayan, istri nelayan, maupun perempuan buruh nelayan untuk diakui kerja-kerjanya sebagai kerja produktif.

Dalam kasus Ibu Zarokah, Ibu Surotun, Ibu Kiswati dan Ibu Kustiah, mereka tergabung dalam organisasi kemasyarakatan yaitu Puspita Bahari. Menurut Moser aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan perempuan berkaitan erat dengan peran-peran perempuan dalam rumah tangga, misalnya memastikan penyediaan dan pemeliharaan sumber daya alam seperti air, perawatan kesehatan dan pendidikan. Kerja-kerja sosial kemasyarakatan yang dilakukan perempuan biasanya kerja sukarela, tidak dibayar dan dilakukan dalam 'waktu luang' (Moser 1993, h. 34). Namun berbeda dari pandangan Moser, karena aktivitas yang dilakukan Puspita Bahari ternyata bukan hanya soal yang terkait dengan peran reproduksi perempuan namun juga berusaha memenuhi kebutuhan strategis gender dan praktis gender di masyarakat pesisir Kabupaten Demak. Masnuah pendiri Puspita Bahari dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa pada musim paceklik Puspita Bahari mempunyai kegiatan tabung sembako, yaitu memberikan bantuan beras kepada keluarga yang kurang mampu, selain itu juga memberikan pemahaman tentang gender dan kekerasan kepada perempuan nelayan.

Keluarga: Unit Primer Diskriminasi Gender Direproduksi

Keluarga adalah institusi kecil yang idealnya cinta dan perlindungan bermukim, tapi tak jarang kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, diskriminasi pada akses pendidikan dan berbagai pelanggaran martabat manusia terjadi. Nussbaum (2000) dalam bukunya *Woman Capability Approach* melihat bahwa keluarga adalah salah satu, bahkan mungkin merupakan situs utama terjadinya kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Hasil wawancara dengan sejumlah responden di Demak menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit kecil yang perlu mendapat reformasi feminisme. Mengapa? Karena kekerasan yang utama terjadi di sana, karena setiap saat ia mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup perempuan. Perempuan diobjektifikasi sedemikian rupa, bukan hanya dari segi administrasi negara yang enggan menyertakan keterlibatannya dalam profesi nelayan, tapi juga ia menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga.

Dewi, istri nelayan yang juga adalah anggota Puspita Bahari Demak menuturkan kisahnya. Tiga tahun pernikahannya hanya menyisakan kemarahan dan kekecewaan, pasalnya suami Dewi adalah seorang penjudi yang hanya bisa menghabiskan uang keluarga.

> Iya (suami adalah seorang nelayan), tapi lebih banyak *nganggur*nya. Lebih banyak hari liburnya daripada kerjanya, tergolong pemalas, tapi sukanya judi, keluar tengah malam, hambur-hambur uang. Saya sebelum nikah kerjanya sudah jualan sembako terus karena kebiasaan suami yang seperti itu modal jadi habis. Dagangan gulung tikar. Dari awal pernikahan sampai anak lahir kerjanya seperti itu terus. Gak bisa mengubah sikapnya sama sekali. Saya tuh, apa yah, jadi perempuan itu harus punya prinisip. Gak bisa perempuan hanya bisanya diam aja, dihina, padahal kita itu ikut bekerja, dia malah enak-enakan hambur-hambur uang. (Dewi 2017, wawancara 2 September)

Dalam banyak kasus, penderitaan yang dialami perempuan di dalam rumah tangga disebabkan oleh cara pandang dan cara bertindak yang memosisikan perempuan bukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, melainkan sebagai instrumen. Ia dipandang dan diperlakukan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan orang lain, kebutuhan anak, suami, dan keluarga. Perempuan dipandang sebagai alat reproduksi, pemasak, pembersih rumah, perawat, dan pemenuhan seksual laki-laki. Singkatnya perempuan dipandang sebagai sekadar objek. Bagaimana pengalaman dan perasaannya tidak dijadikan landasan untuk pertimbangan moral bagi laki-laki dalam memperlakukannya sebagai manusia. Nussbaum (1995) melihat bahwa objektifikasi adalah

gagasan yang amat penting dalam kerangka teori feminis. Dalam tulisannya yang berjudul "Objectification", ia memaparkan bagaimana seseorang memperlakukan orang lainnya dengan mengesampingkan subjektivitasnya. Dalam kehidupan Dewi, ia adalah alat bagi suaminya untuk bertahan hidup, menjadikan Dewi sebagai tulang punggung keluarga tanpa memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup bersama. Dewi menjadi objek, karena di dalam kerja yang ia lakukan ia tertekan dan dihadapkan pada situasi yang tanpa pilihan. Dewi mengada sebagai instrumen bagi suaminya.

Bukan hanya Dewi yang menjadi korban KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), Dayah, ketua Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Demak juga mengalami kekerasan berlapis dari suaminya. Budaya memengaruhi kerangka penafsiran setiap orang dan termanifestasi dalam tindakan. Diskriminasi terjadi sejak dalam kerangka berpikir. Suami Dayah, sekadar yakin bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah hanya memberikan pendidikan agama pada anak perempuan. Sekolah formal baginya bukan diperuntukkan bagi anak perempuan.

> Dulu saya kena KDRT, sebelum masuk Puspita Bahari saya langsung lari ke bidan. Ini memar separuh, hidung saya berdarah. Pikiran saya begini, ini kalau tidak saya papas dengan obat nanti sakitnya seperti apa. Saya lari ke bidan setempat dia tidak mau. Saya lari ke dokter, dokter Kinan. Ini (menunjuk ke arah utara) dokter ini tidak mau, karena kalau mau minta obat dan divisum harus minta surat kepolisian dulu. Waktu itu kan malam Mbak, polisi *ndak* bisa. Terus saya terpaksa lari ke bidan Moro setempat, saya *oyak*. (Dayah 2017, wawancara 2 September).

Sejalan dengan pemikiran Kant, Nussbaum (1995) melihat bahwa objektifikasi terhadap perempuan terjadi saat otonomi dan subjektivitas perempuan sebagai manusia ditiadakan. Baik Dewi dan Dayah dipersepsi sebagai benda, tidak otonom, tidak autentik pada dirinya dan tidak berdaya. Hal ini menjadi keseharian perempuan saat mereka menerima hal ini sebagai kewajaran. Keluarga-keluarga ini tidak mendeteksi adanya hierarki dalam rumah tangga sehingga diskriminasi dianggap sebagai yang kodrati.

Dalam pernikahan, relasi yang hierarkis dipertahankan dan terus direplikasi. Hierarki suami terhadap istri, hierarki ayah terhadap anak. Laki-laki menjadi satu-satunya subjek yang menentukan keputusan, karena asumsinya ia adalah satu-satunya manusia yang berdaya, pemimpin yang punya otonomi diri dan kepemilikan atas keluarga. Perempuan hanya pengikut, pendamping. Ketika perempuan angkat suara dan menentukan apa yang ingin ia lakukan, ia dianggap perempuan yang menyimpang dari adat kebiasaan, perlu diluruskan lewat teguran atau bila perlu lewat pukulan. Dayah bercerita bahwa KDRT yang ia terima dari suaminya karena perbedaan pandangan tentang pendidikan anak.

> Itu masalahnya menyekolahkan anak. (Menurut suami) Anak perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Cukup di pesantren aja. Kalau saya gak gitu. Siapa yang berani maju ya dia yang jadi orang. Walaupun saya orang bodo, anak saya jangan sampai gitu. (Dayah 2017, wawancara 2 September).

Perbedaan pandangan soal apa yang baik bagi anak menjadi alasan percekcokan dalam keluarga Dayah. Keputusan Dayah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah formal menjadi pembenaran bagi suaminya untuk memukuli Dayah. Suaminya juga memutuskan untuk tidak menanggung biaya sekolah anak perempuan mereka. Hal ini mendorong Dayah untuk bekerja lebih keras lagi demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak perempuannya. Potret ini menunjukkan ketimpangan relasi dalam keluarga. Budaya patriarki adalah wabah yang mengancam eksistensi perempuan. Ia menghambat perempuan untuk tumbuh dan hidup.

Patriarki dipraktikkan tidak hanya dalam praktik rumah tangga tapi juga praktik bernegara. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah mendiskriminasi perempuan. Meletakkan perempuan pada posisi yang asimetris dengan laki-laki. Kerja-kerja yang dilakukan oleh perempuan amat banyak dan penting bagi rumah tangga nelayan juga rumah tangga nasional tapi hingga saat ini kesejahteraan mereka sebagai perempuan dan sebagai manusia tidak mendapat perhatian. Keinginan mereka untuk diakui sebagai nelayan perempuan malah dianggap kegilaan, sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Asumsi penolakan eksistensi perempuan nelayan adalah karena tidak mungkin seorang perempuan menjadi nelayan. Tidak mungkin perempuan ikut melaut. Keyakinan yang membabi-buta membuat realitas menjadi tidak terlihat sebagaimana adanya.

Kondisi istri nelayan dan perempuan nelayan amatlah memprihatinkan. Diskriminasi terjadi di unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Kesempatan perempuan untuk memiliki hidup yang baik dan layak sudah dirampas sejak ia lahir ke dunia, saat keluarga memperlakukannya secara berbeda. Perempuan dijadikan sebagai manusia kelas dua. Perempuan diharuskan menjadi "seperti perempuan", artinya tidak perlu pendidikan tinggi, melakukan pekerjaan domestik dan cukup mengurusi urusan rumah tangga. Diskriminasi pada kesempatan atas pendidikan menjadi ancaman serius bagi perempuan.

Praktik ini secara tidak langsung telah memiskinkan perempuan dan membatasi aksesnya pada kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Pembagian kerja berdasarkan gender juga bermasalah. Menjadi perempuan nelayan bukan tanpa dilema. Budaya setempat meyakini bahwa adalah ganjil bila seorang perempuan menjadi nelayan. Kerja perempuan, meski amat banyak dan menyentuh jantung kenelayanan itu sendiri (baik itu sebagai pengemudi kapal dan anak buah kapal) tetap hanya dimaknai sebagai kerja rumah tangga, pendampingan bagi suami dan bukan sumber penghasilan keluarga, keyakinan ini bersumber dari asumsi bahwa keutamaan seorang perempuan adalah ibu rumah tangga, pun ia melakukan kerja kenelayanan sebanyak atau bahkan lebih banyak dari kerja laki-laki, produktivitasnya tidak dianggap bernilai ekonomis, karena pencetak rupiah hanyalah laki-laki. Keyakinan semacam ini perlu di dekonstruksi. Perbaikan nasib perempuan hanya dimungkinkan bila kerangka konseptual mengenai kesetaraan gender ditumbuhkan di dalam lingkungan sosial. Pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Organisasi Perempuan Harus Agresif Melawan Patriarki

Demak dikenal sebagai kota para Wali, religiositas menjadi penandanya, namun sayangnya mayoritas masyarakat yang hidup di pesisir pantai berada dalam garis kemiskinan turun-temurun, kemiskinan struktural, dalam masyarakat miskin perempuanlah yang berada pada lapisan paling dasar kemiskinan dan rentan terhadap kekerasan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, Jawa Tengah menempati posisi keempat dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi yaitu sebanyak 1.123 kasus (Komnas Perempuan 2017). Penghapusan kekerasan adalah salah satu yang diperjuangkan Puspita Bahari. Selain inisiatif ekonomi, Puspita Bahari juga melakukan advokasi perempuan korban kekerasan di wilayah pesisir. Kesadaran anggota Puspita Bahari akan hak-hak dan perjuangan mereka melawan kekerasan menjadi penting untuk didokumentasikan.

> Pertama kalinya Puspita Bahari mendampingi kasus KDRT itu kasusnya datang dari anggota Puspita Bahari itu sendiri, 2010. Jadi sangat ada penolakan keras dari masyarakat, kami pertama kali mendapatkan protes yang sangat luar biasa dari masyarakat, kami dianggap mencampuri urusan orang lain, mereka menganggap sebagai kewajaran ada laki-laki/suami yang memukul istri. Ini kekerasan yang terjadi pada perempuan dianggap biasa, jadi ketika hal tersebut diomongin kepada masyarakat itu dianggap tabu, apalagi sampai dilaporin ke ranah hukum, itu dianggap sangat tidak pantas dan tidak baik. (Masnuah 2017, wawancara 3 September)

Mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang mudah bagi Puspita Bahari, bukan soal langkah hukum apa yang harus diambil, namun persoalan dari dalam masyarakat itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Masnuah bahwa mempersoalkan perilaku kekerasan suami pada istri adalah hal yang dianggap tabu dan tidak pantas. Namun Masnuah berkeyakinan bahwa rantai kekerasan yang ada di masyarakat pesisir harus diputus sesegera mungkin, tekadnya beranjak pada pengalaman personalnya.

> Setelah menikah perempuan pun bebannya semakin banyak karena secara ekonomi, dari suami tidak menentu, sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga nelayan itu perempuan, sampai utang, gadai jual barang itu semua perempuan. Laki-laki tidak mau tahu berapa sih kebutuhan ekonomi keluarga setiap hari, yang penting mereka melaut, dapat banyak dapat sedikit gak mau tahu, yang penting mereka sudah bekerja, sisanya adalah urusan perempuan. (Masnuah 2017, wawancara 3 September)

Puspita Bahari merupakan organisasi yang jasanya amat besar bagi peningkatan kesejahteraan perempuan nelayan di Demak. Dewi dan Dayah adalah dua perempuan yang telah mendapat manfaat dari organisasi ini.

> Saya gabung tahun 2016 dengan Puspita Bahari. Dari bantuan sosial yang diberikan Puspita Bahari itu saya pakai untuk modal buat usaha sembako lagi, karena dulu udah pernah usaha ini, jadi ya sudah ada ide, masih ada cara-caranya berusaha lah. Walaupun namanya orang berdagang itu ada kendalanya. (Dewi 2017, wawancara 2 September)

Saat mengalami KDRT, Dayah segera melaporkannya pada Puspita Bahari, kemudian dari pertemuan itulah ia diperkenalkan pada LBH Apik Semarang.

> Dari LBH Apik Semarang yang dampingi. Saya dibawa ke Dinas Sosial, karena setelah itu saya gak kerja. Saat itu saya diberi modal Rp 1.000.000,00. Saya dikasih modal untuk bikin kerupuk dan intip, itu modal dari Dinas Sosial. (Dayah 2017, wawancara 2 September).

Anggota Puspita Bahari mengapresiasi apa yang telah dilakukan Puspita Bahari Demak pada diri mereka. Pemberdayaan ekonomi menguatkan posisi mereka di dalam keluarga dan masyarakat, namun untuk sampai pada transformasi ke arah masyarakat yang egaliter dibutuhkan pendekatan dan pemahaman feminisme.

Penutup: Kompleksitas Persoalan & Tantangan yang Dihadapi Perempuan Nelayan

Pada 13 Oktober 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak mengeluarkan surat keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara untuk bu Zarokah dan bu Surotun (perempuan nelayan dari Desa Morodemak), yang isinya mengubah status pekerjaan kedua perempuan nelayan tersebut yang sebelumnya ibu rumah tangga menjadi nelayan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Puspita Bahari dan perempuan nelayan di Demak memiliki kekuatan mendobrak dinding birokrasi yang bias. Meskipun demikian ada tantangan yang terus menyertai perjuangan mereka. Sebagaimana dalam penelitian ini, masih banyak persoalan yang berlapis, terutama terkait cara pandang masyarakat dan birokrat terhadap eksistensi dan kerja perempuan nelayan. Berangkat dari tutur perempuan nelayan dalam tulisan ini, terlihat bahwa persoalan yang dihadapi mereka sangat kompleks dan berlapis. Bahkan kedua perempuan nelayan bu Zarokah dan bu Surotun masih harus melewati proses administrasi lagi untuk mendapatkan kartu nelayan. Sejalan dengan analisis gender Kabeer yang menegaskan bahwa ada keterkaitan antar lembaga yaitu keluarga, komunitas, pasar, negara, dalam konteks perempuan nelayan di Desa Morodemak dan Purworejo, keterlibatan lembaga-lembaga terkait dapat dijelaskan seperti ini:

Negara, dengan bercermin dari UU No. 7 tahun 2016 dapat dikatakan bahwa negara mengabaikan hak-hak perempuan nelayan untuk diakui baik secara administratif maupun pengakuan politik. UU tersebut merupakan contoh dari kebijakan yang buta gender. Tak hanya kebijakan publik, negara juga mencakup pejabat publik, mulai dari level nasional hingga desa. Dalam penelitian ini terlihat bahwa pejabat publik sangat bias dalam memandang perjuangan perempuan nelayan dan tidak hadir memberikan pelayanan untuk perempuan nelayan agar diakui statusnya.

Pasar, di dalam masyarakat pesisir, masyarakat mengambil peran dalam pembentukan peran gender, secara tidak langsung pasar menempatkan perempuan sebagai orang yang melakukan transaksi tawar-menawar dan kemudian laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama yaitu nelayan. Dalam mekanisme pasar bahkan ada kecenderungan kehadiran laki-laki dalam proses tawar-menawar tidak dapat diterima (lihat kisah bu Kiswati).

Komunitas, mencakup organisasi kemasyarakatan yang ada, termasuk komunitas keagamaan dan organisasi perempuan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam penelitian ini komunitas yang diteliti adalah Puspita Bahari sebagai organisasi perempuan nelayan di Demak. Puspita Bahari memiliki peran strategis dan positif dalam memberdayakan perempuan nelayan di Demak dengan mengakomodasi kebutuhan ekonomi perempuan dan kebutuhan strategis gender seperti pengetahuan tentang gender dan kekerasan. Sedangkan komunitas lainnya seperti dari kalangan agama justru memandang negatif kegiatan yang dilakukan Puspita Bahari. Meskipun ada kommunitas lainnya seperti KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), organisasi nasional yang juga membantu mendorong pengakuan perempuan nelayan. Jadi komunitas dalam masyarakat saling tumpang tindih dan terbelah, sehingga cara pandang masyarakat tentang pengakuan hak nelayan perempuan juga bervariasi.

Keluarga, unit terkecil dalam pengambilan keputusan dan pembagian peran gender. Secara sosial perempuan nelayan justru sudah diakui oleh laki-laki/suami. Namun dalam perjuangannya dukungan keluarga menjadi terbatas karena meski ada dorongan dari keluarga, pembagian kerja dalam rumah tangga masih bersifat kaku, laki-laki bekerja, perempuan tetap memasak. Bahkan di sisi yang lain, rumah tangga menjadi unit untuk mereproduksi kekerasan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengakuan terhadap perempuan nelayan masih bersifat pengakuan secara sosial saja. Perempuan diperbolehkan untuk pergi melaut namun untuk mengubah identitas terlihat masih jauh perjuangannya. Bahkan meski perempuan dibolehkan melaut—pada tahap ini masyarakat tidak bias karena ada alasan ekonomi—pembagian kerja di ruang domestik tidak ikut mencair, perempuan tetap dibebani dengan segudang kerja-kerja domestik, tugas perawatan masih dibebankan pada perempuan nelayan.

Pengakuan terhadap identitas perempuan nelayan hanya langkah awal untuk memperbaiki kondisi perempuan nelayan di seluruh Indonesia. Pengakuan ini juga merupakan salah satu cara untuk memperbaiki nasib perempuan nelayan dan keluarga nelayan. Diharapkan perubahan kebijakan juga dapat terjadi sehingga dapat mengakomodasi kerja perempuan di sektor perikanan mulai dari menangkap ikan, menjual, mengolah hingga memasarkan.

Daftar Pustaka

Collins, H 1992, "Review of 'If Women Counted: A New Feminist Economics'", *Review of Income and Wealth*, vol. 38, no. 2, h. 237-243.

Kabeer, N 1994, *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*, Kali for Women and International Books, New Delhi.

Komnas Perempuan 2017, *Catatan Akhir Tahun 2017*, diakses 30 Agustus 2017, https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2017/04/CATAHU-2017-Komnas-Perempuan.pdf

LBH-Semarang 2011, "Puspita Bahari: Organisasi Nelayan Perempuan Desa Morodemak, Kabupaten Demak", *Laporan Analisis Sosial Perempuan Demak*, LBH-Semarang, Semarang.

Moser, ONC 1993, *Gender Planning and Development, Theory, Practice, Trainning*, Routledge, USA & Canada.

Nelson, JA 1995, "Feminism and Economics", *Journal of Economic Perspectives*, vol. 9, no. 2, h. 131-148.

Nelson, JA n.d., *Feminist Economics*, diakses 12 Maret 2017, http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_F000286&edition=current&q=feminist%20economics&topicid=&result_number=1

Nussbaum, MC 2000, *Women and Human Development, the Capabilities Approach*, Cambridge University Press, New York.

Nussbaum, MC 1995, "Objectification", *Philosophy and Public Affairs*, vol 24, no.4, h. 249-291.

Saptari, R & Holzner, B 2016, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*, Kalyanamitra, Jakarta.

Catatan Akhir

1 Artinya: Perempuan kok melaut. Kata-kata ini diucapkan sebagai bentuk keheranan atau bentuk ledekan terhadap perempuan yang pergi ke laut. Dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa sejak dari level desa, hingga DPRD Provinsi Jawa Tengah, kalimat ini sering digunakan untuk mempertanyakan ulang dan bahkan menjatuhkan harga diri perempuan nelayan yang melaut.

2 GDP adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan secara dominan dalam perhitungan statistik ekonomi untuk menghitung "kekayaan" suatu negara. GDP atau PDB (Produk Domestik Bruto) adalah perkiraan total dari nilai mata uang yang diproduksi suatu negara pada tahun tertentu, termasuk sektor jasa, penelitian, dan pengembangan. Produk Domestik Bruto juga dapat dihitung per kapita (per orang) untuk memberikan contoh relatif dari pembangunan ekonomi bangsa walau yang dihitung adalah angka kotor. (http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-15/2463/apa-beda-pdb-dan-pnb#.VI2reNIrLIU)

3 Rahma Iryanti memberikan materi diskusi pada acara diskusi JP 92 Perempuan dan Kebijakan Publik pada 8 Maret 2017 di Balai Sarwono, Jakarta.

4 Dalam bahasa jawa, artinya adalah mengambil/menarik jaring.

5 Naskah ini diterbitkan dalam The New Palgrave Dictionary of Economics, sebuah kamus online yang memuat bukan definisi pada setiap istilah dalam studi ekonomi, bukan hanya definisi singkat namun juga tersedia akses terhadap bahan rujukan. Tulisan Julie A. Nelson menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami feminis ekonomi.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
5. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
6. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

FORDFOUNDATION

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia
ppni

1410 1533

Patung sampul depan: "Solidaritas" (Dolorosa Sinaga, 2000)